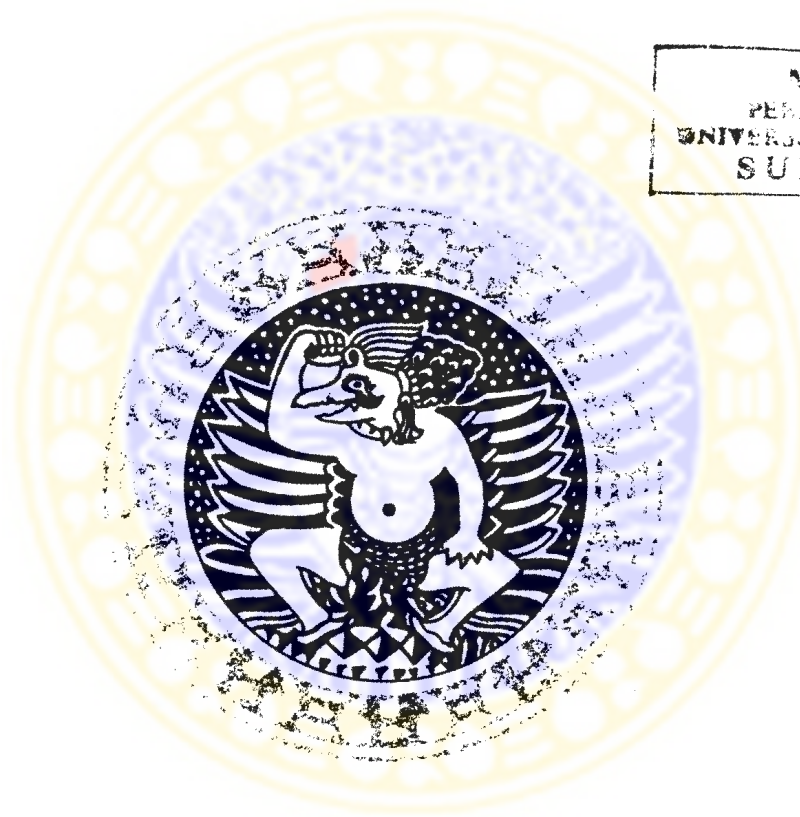


File  
19/01  
Pon  
P

**SKRIPSI**

***SHANTI PURNIADEWI PONTOH***

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA  
PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN**

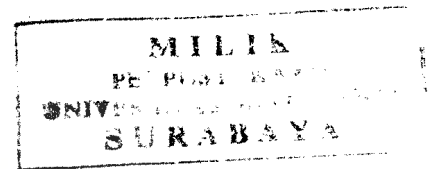


MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

# **PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN**

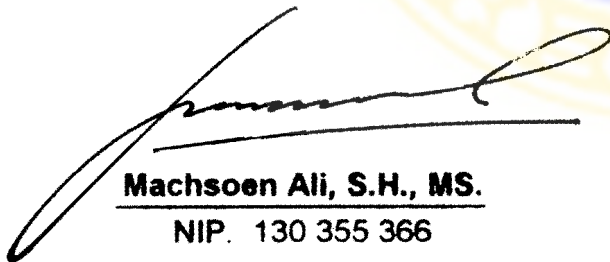
## **SKRIPSI**




Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



**Machsoen Ali, S.H., MS.**  
NIP. 130 355 366



**Shanti Purniadewi Pontoh**  
NIM. 039514142

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan hak-hak bagi pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan.

Hak – hak pekerja tersebut adalah mendapat uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian. Pembayaran uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian bukanlah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pengusaha karena tindakan pengusaha yang salah dalam pemutusan hubungan kerja melainkan hak pekerja atas adanya PHK. Besarnya uang pesangon itu biasanya seimbang dengan lamanya hubungan kerja atau yang biasanya disebut masa kerja dari masa kerja yang bersangkutan.

Pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian juga didasarkan pada alasan – alasan pemutusan hubungan kerja tersebut dan pelaksanaannya harus dilakukan secara tunai (pasal 33 Kep. Men. No. 150 tahun 2000).

- b. Upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan hak-haknya bisa dibagi melalui dua cara yaitu :

##### 1. Melalui BHP.

Dalam pembagian harta pailit curator (BHP) diwajibkan menyusun suatu daftar yang akan dimintakannya persetujuan kepada hakim Pengawas. Untuk selanjutnya dalam pemberesan harta pailit setiap kali sudah didapat cukup uang tunai hasil penjualan , hakim pengawas dapat memerintahkan pembagiannya kepada para kreditur yang telah dicocokkan.

## 2. Melalui Arbitrase.

Para pihak bisa menunjuk arbitrase sebagai kurator. Dalam hal curator adalah arbitrase maka arbitrase tersebut pertama-tama akan memanggil para pihak yang berkepentingan dengan boedel pailit, yang dalam hal ini pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Perwakilan pekerja perusahaan pailit.
2. Kreditur-kreditur yang mempunyai piutang-piutang terhadap perusahaan yang mengalami pailit.

Setelah adanya inventarisasi pihak-pihak tersebut, dilakukan bargaining position dari pihak-pihak yang telah di inventaris sebagai pihak yang berhak atas harta pailit, selanjutnya maka akan dilakukan penetapan bagian dari para pihak yang berhak atas boedel pailit. Usaha para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya disini bisa dilakukan dengan pengajuan pertimbangan-pertimbangan tertentu pada arbitrase untuk di posisikan sebagai penerima boedel pailit yang pertama

Selanjutnya si debitur akan diberitahu mengenai jumlah tagihan-tagihan dari pihak yang telah ditetapkan tersebut. Setelah diketahuinya pemberitahuan tersebut maka akan dilakukan pemberitahuan insolvensi dan eksekusi atas boedel pailit dilakukan pada pelelangan umum. Kadangkala ada kreditur yang tidak mau menerima atau tidak mau melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh Arbitrase, untuk itu para kreditur yang lainnya (yang setuju oleh putusan arbitrase) tetap bisa meminta pelaksanaan eksekusi dari keputusan tersebut dengan meminta penetapan eksekusi

kepengadilan Niaga. Dan untuk bagian dari kreditur yang tidak puas tersebut bisa dititipkan kepengadilan Niaga sebagai konsinyasi.

## 2. Saran

Pekerja sebagai faktor penting dalam dunia usaha diharapkan terpenuhi hak-haknya. Tidak terkecuali terhadap pekerja pada suatu perusahaan yang mengalami pailit. Untuk itu upaya yang dirasakan paling cocok untuk melindungi hak-hak pekerja pada perusahaan yang mengalami pailit tersebut adalah melalui penunjukan curator arbitrase karena arbitrase mempunyai keunggulan daripada BHP yaitu dari segi waktu penyelesaiannya yang lebih cepat, penanganannya dilakukan oleh para expert, dan tidak ada upaya lain untuk menolak putusan Arbitrase sehingga disini ada pencegahan terhadap berlarut-larutnya pembagian harta pailit. Sedangkan usaha para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya disini bisa saja dilakukan dengan pengajuan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh wakil dari pekerja pada arbitrase untuk di posisikan sebagai penerima boedel pailit yang pertama.